

EFEKTIVITAS DANA INSENTIF DAERAH DALAM MENINGKATKAN BELANJA DAERAH DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

SUFYAN ALBAR MAULANA

NPP : 30.0854

Asdaf Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0854@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Based on the mandate of Law Number 6 of 2021 concerning the 2022 Regional Revenue and Expenditure Budget Article 1 Paragraph 13. Transfers to the Regions are part of State Expenditure in the context of funding the implementation of fiscal decentralization in the form of Balancing Funds, Regional Incentive Funds, Special Autonomy Funds, and Privileges Funds for the Special Region of Yogyakarta. And Article 1 paragraph 18 Regional Incentive Funds are funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget for certain regions based on certain criteria with the aim of rewarding certain improvements and/or achievement of performance in the field of regional financial governance, public government services, basic services public, and social welfare. **Purpose:** the research aims to find out how the effectiveness of Regional Incentive Funds is in increasing Regional Expenditures in the City of Madiun, the inhibiting and supporting factors, and what efforts have been made in dealing with the problems. **Method:** This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation and direct interviews with related parties. As well as in this study used the theory of Lubis and Husaini to make operational concepts. **Results/Findings:** The results of the analysis show that the effectiveness of Regional Incentive Funds is influenced by factors such as compatibility between regional development priorities and national policy directions, regional institutional capacity in managing and allocating funds, as well as transparency and accountability for the use of funds. In the cases studied, the Regional Incentive Fund has been effective in increasing regional spending in the City of Madiun, especially in priority sectors that have been determined by the central government. However, there are also obstacles in managing these funds, such as the tendency to allocate funds to projects that are not fully in line with regional development priorities due to differences in perceptions between the central government and regional governments. **Conclusion:** The results of this study are expected to provide input for the central and regional governments in increasing the effectiveness of Regional Incentive Funds.

Keywords: Regional spending, regional incentive funds, effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2022 Pasal 1 Ayat 13 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Pasal 1 ayat 18 Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dana Insentif Daerah dalam meningkatkan Belanja Daerah di Kota Madiun, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan. **Metode:** Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Serta dalam penelitian ini digunakan teori dari Lubis dan Husaini untuk membuat operasional konsep. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas Dana Insentif Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan dana, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Dalam kasus-kasus yang diteliti, Dana Insentif Daerah telah efektif dalam meningkatkan belanja daerah di Kota Madiun. terutama pada sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat juga kendala dalam pengelolaan dana ini seperti kecenderungan untuk mengalokasikan dana pada proyek-proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dikarenakan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas Dana Insentif Daerah.

Kata Kunci: Belanja daerah, dana insentif daerah, efektivitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2022 Pasal 1 Ayat 13 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Pasal 1 ayat 18 Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang pengalokasian-nya ke daerah didasarkan pada kinerja atau By Performance adalah Dana Insentif Daerah (DID). Dana Insentif Daerah ini bersifat sebagai reward atau penghargaan dimana tidak semua daerah mendapatkannya akan tetapi setiap daerah mempunyai kesempatan yang sama serta berusaha untuk mendapatkan dana penghargaan tersebut sesuai dengan indikator atau kriteria yang telah ditentukan. Bagi daerah yang memiliki kinerja yang baik, salah satunya memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan, daerah tersebut akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk hibah, dan bagi daerah yang dinilai belum memiliki kinerja yang baik maka tidak akan mendapat apa-apa.

Meskipun alokasi transfer ke daerah terus-menerus mengalami peningkatan, namun besarnya jumlah dana transfer yang diberikan tidak sebanding dengan kemampuan daerah dalam mengelolanya. Selain itu, kewenangan yang semakin besar dalam mengelola dana tersebut juga menjadi tantangan bagi daerah yang masih belum mampu mengelola dana dengan baik. Dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sudah seharusnya pemerintah daerah mengolah dana tersebut dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Belanja daerah juga dapat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi, hal ini berkaitan erat dengan bagusnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tentu hal tersebut berkaitan dengan suksesnya pembangunan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sebagai tanda bahwa pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja daerah dengan baik untuk penggunaan kinerja. inilah yang menjadi penyebab belanja daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan semakin tinggi tingkat belanja daerah pada suatu pemerintahan maka seharusnya tingkat pelayanan kepada masyarakat pada daerah tersebut juga semakin meningkat. Pemerintah daerah perlu melakukan pertanggungjawaban publik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa optimalisasi anggaran secara efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Efektivitas ini memiliki arti mengarahkan anggaran yang telah dikeluarkan dapat mencapai tujuan atau target yang ditujukan untuk kepentingan publik. Sehingga pengukuran efektivitas ini dinilai penting atau berpengaruh bagi pendapatan daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap efektivitas dana insentif daerah melalui penelitian ini, dengan judul: “Efektivitas Dana Insentif Daerah Dalam Meningkatkan Belanja Daerah Di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur”

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Muh. Habibi Wahid, 2015 berjudul Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian , dapat digambarkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten takalar masih belum stabil, hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di kabupaten tersebut Namun sebagian besar hasil pendapatan asli daerahnya mulai terserap sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten takalar. penelitian Roudlotul Jannah, 2017 berjudul Analisis Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa efektivitas anggaran belanja Bappeda

Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mencapai persentase 95,88%. Pada tahun 2015, efektivitas belanja mengalami kenaikan sebesar 0,81% dan mencapai persentase 96,69%. Namun, pada tahun 2016, efektivitas belanja mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun sebelumnya, dengan persentase efektivitas belanja mencapai 93,60%. Pada tahun 2017, efektivitas belanja mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari periode tahun 2014 hingga 2017, anggaran belanja Bappeda Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan efektif. penelitian Synta¹ dan Nurhazana², 2020 berjudul Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Tertentu di Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa Efektivitas Dana Insentif Daerah di Kabupaten Bengkalis tergolong cukup efektif. Akan tetapi hanya kriteria utama yang mampu dicapai oleh pemerintah kabupaten Bengkalis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Beberapa referensi penelitian yang dijelaskan dalam format Tabel 2.1 dapat berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian yang difokuskan pada pengukuran efektivitas Dana Insentif Daerah. Penelitian di atas memiliki kesamaan seperti kesamaan fokus penelitian di bidang keuangan maupun kesamaan metode pengukuran yang digunakan hingga perbedaan yang terdapat pada lokasi fokus dan juga teknik dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan. Kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dalam penggunaan data yakni menggunakan data keuangan Kota Madiun pada tahun anggaran 2018-2021 dimana penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan data keuangan pada periode 2017-2020 saja. Selain itu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian baru.

1.5. Tujuan.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan yang menjadi faktor penghambat dalam proses menjalankan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan disiplin PNS di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa.

II. METODE

Penelitian adalah rangkaian proses yang dimana peneliti secara sistematis mencari dan memperoleh kebenaran di lapangan berdasarkan metode ilmiah dan kaidah yang berlaku, serta dipadukan dengan waktu, lingkungan, dan kondisi, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara efektif. efisien.

Menurut Nurdin & Hartati (2019: 13) penelitian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencari jawaban dari persoalan dengan cara-cara ilmiah, melalui pola fikir reflektif dengan prosedur yang tentunya sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan serta menggunakan langkah yang sangat sistematis, hati-hati dan logis dengan pendekatan empiris yang mengandalkan indera dan rasionalisme. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Belanja Daerah di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur", termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis yang bersifat deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Belanja Daerah di Pemerintah Kota

Madiun

a. Efektivitas Dana Insentif Daerah

Berdasarkan pengertiannya efektivitas merupakan tolak ukur atas berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, dalam mengukur Efektivitas Dana Insentif Daerah terdapat 3 Dimensi yang terdiri dari keberhasilan daerah dalam mendapatkan dana insentif daerah, pelaksanaan program dana insentif daerah, serta tercapainya sasaran penggunaan dari dana insentif daerah.

Pendekatan Sumber

Dana Insentif Daerah merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada suatu daerah sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam bidang tata kelola keuangan daerah.

1. Keberhasilan dari pendapatan dana insentif daerah berdasarkan kriteria

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 160/PMK.07/2021 Dana Insentif Daerah tersebut dialokasikan berdasarkan kriteria utama yang telah ditetapkan, yang terdiri dari opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan wajar tanpa pengecualian, penetapan peraturan daerah tepat waktu, serta penggunaan *e-Government (e-budgeting, dan e-procurement)*.

Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Sudandi, S.Sos pada hari selasa 10 januari 2023 mengungkapkan bahwa: Hasil penilaian BPK sudah cukup baik. BPK telah memberikan penilaian "wajar tanpa pengecualian" bagi pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan keuangan. Namun, tentu saja masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki. Beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK antara lain terkait dengan pelaporan keuangan, pengendalian pengeluaran, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Kami akan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa penulis simpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Madiun mendapatkan hasil yang positif dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, meskipun begitu masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki terkait dengan pelaporan keuangan, pengendalian pengeluaran, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Serta dalam memperbaiki temuan-temuan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Sudandi, S.Sos mengungkapkan bahwa: Kami akan melakukan perbaikan pada sistem pelaporan keuangan, mengoptimalkan pengendalian pengeluaran, serta memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Selain itu, kami juga akan meningkatkan kapasitas staf kami dalam hal pengelolaan keuangan dan memperkuat pengawasan internal. Berdasarkan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah adalah dengan mendapatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan wajar tanpa pengecualian (WTP), Dari tabel dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria utama atau persyaratan berupa opini badan pemeriksa keuangan mulai tahun Anggaran 2018 hingga tahun Anggaran 2022 Kota madiun mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian maka salah satu kriteria utama ini dapat terpenuhi. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa Kota Madiun telah melaksanakan konsep *Smart City* atau *e-Government* dengan baik, dengan demikian salah satu indikator kriteria utama dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah di Kota Madiun telah terpenuhi. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, hasil wawancara serta teori yang ada maka dapat

disimpulkan bahwa pendapatan dana insentif daerah di kota madiun terbilang berhasil dengan memenuhi semua kriteria-kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Jumlah Dana yang tersedia

Berkaitan dengan jumlah dana insentif daerah Kota Madiun dalam waktu 4 tahun terakhir selalu mendapatkan Dana Insentif Daerah bahkan Kota Madiun sempat mendapatkan Dana Insentif Daerah tambahan pada tahun 2022. Rincian jumlah dana insentif daerah di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022. Menurut Bapak Zain Fikri Hanastyono mengungkapkan bahwa: “Kota Madiun sebelumnya telah mendapatkan Dana Insentif Daerah selama 4 tahun terakhir secara berturut turut hal ini dapat dicapai tentunya karena pengelolaan keuangan Kota Madiun terbilang baik kemudian mengenai jumlah alokasi DID untuk Kota Madiun pada tahun 2019 sampai 2021 juga terbilang banyak, hanya saja pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang drastis namun mengenai jumlah dana yang dialokasikan dari pusat ke daerah itu jumlahnya ditentukan oleh pusat jadi daerah hanya tinggal menerima” Berdasarkan observasi penulis dilapangan, hasil wawancara serta teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dana insentif daerah di Kota Madiun dapat dikatakan cukup banyak namun mengenai jumlah dana insentif daerah yang dialokasikan ke daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pendekatan Proses

Penatausahaan dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah adalah suatu proses administratif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi terkait penggunaan dan penyaluran dana insentif daerah. Proses penatausahaan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana insentif daerah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, serta terhindar dari potensi kecurangan atau penyalahgunaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penatausahaan pelaksanaan Dana Insentif Daerah antara lain adalah:

1. Membuat rencana penggunaan dana insentif daerah dengan jelas dan terperinci, termasuk besaran dan target kinerja yang harus dicapai oleh setiap OPD.
2. Melakukan pengajuan anggaran dan persetujuan penggunaan dana insentif daerah secara transparan dan akuntabel.
3. Membuat dokumen penggunaan dana insentif daerah yang lengkap dan akurat, termasuk catatan penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana.
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penggunaan dana insentif daerah, serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen tersebut.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa Dana Insentif Daerah digunakan secara tepat sasaran dan efektif.

Berdasarkan observasi penulis berdasarkan rencana di atas dalam realita di lapangan penulis menemukan bahwa pengadaan laptop sejumlah 62 unit untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun tidak terealisasi, hal tersebut terjadi karena perbedaan spesifikasi laptop yang diberikan oleh tender laptop sehingga pengadaan tersebut dibatalkan. Berdasarkan data rencana penggunaan Dana Insentif Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021, Dana Insentif Daerah digunakan untuk bidang Pendidikan sebesar Rp.3.600.000.000, bidang Kesehatan sebesar Rp.14.758.713.795, serta bidang penguatan ekonomi sejumlah Rp.13.798.197.705. Pelaksanaan Program Dana Insentif Daerah Menurut Kepala Bidang Anggaran Bapak Fajar Wahyu Margono, ST: Dana Insentif Daerah sesuai peraturan yang ada harus

disalurkan dengan memprioritaskan bidang Pendidikan, Kesehatan, serta ekonomi, misalnya pada saat pandemi covid-19 Dana Insentif Daerah sangat berguna untuk meningkatkan fasilitas pelayanan Kesehatan serta berperan penting dalam bidang perekonomian masyarakat, yaitu membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bertahan menghadapi covid-19 dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat (UMKM) salah satunya adalah untuk menjual produknya secara online, namun terkadang kami juga kualahan dalam penyalurannya, Tentu saja, dalam penyaluran DID di Kota Madiun, kami mengalami beberapa kebingungan. Salah satu kebingungan yang sering dihadapi adalah terkait dengan ketentuan dan prosedur penyaluran DID yang sering berubah atau belum jelas. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi mengenai aturan dan prosedur juga menyebabkan kebingungan dalam penyaluran DID.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penyaluran Dana Insentif Daerah di Kota Madiun sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun. Berdasarkan observasi peneliti, hasil wawancara serta teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dana insentif daerah di kota madiun sudah efektif dilihat dari penatausahaan yang baik dan perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Pendekatan Sasaran

Sasaran DID adalah tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai melalui penggunaan Dana Insentif Daerah (DID). Sasaran ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah yang bersangkutan, dan dapat meliputi berbagai bidang seperti peningkatan kinerja dan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak positif bagi masyarakat.

Sasaran DID bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Menurut Kepala Bidang Anggaran Bapak Fajar Wahyu Margono, ST: “Sasaran penggunaan DID yang berhasil dicapai antara lain adalah peningkatan kinerja dan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak positif bagi masyarakat Kota Madiun.” Berdasarkan Realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah tahap II, Kota Madiun berhasil menyerap dana tersebut sebesar 30.942.013.688 yang terdiri dari Bidang Pendidikan sebesar 3.600.000.000, Bidang Kesehatan sebesar 4.480.496.088, serta Bidang Penguatan Ekonomi sebesar 22.861.517.600. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan serta, hasil wawancara serta teori yang ada menurut mahmudi bahwa penyerapan Dana Insentif Daerah di Kota Madiun terbilang efektif sesuai dengan kriteria kinerja keuangan menurut sumenge (2013:77).

Faktor Penghambat Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Belanja Daerah Di Kota Madiun

Penyaluran Dana Insentif Daerah yang berada di Kota Madiun yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Madiun telah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terkait penyaluran Dana Insentif Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, bahwa prosedur tersebut berpedoman pada peraturan Menteri keuangan sebagaimana di atas.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Insentif Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Madiun Bapak Fajar Wahyu Margono, ST pada hari selasa 10 januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal penyaluran sering kali terjadi ketidaksesuaian antara prioritas dan kebutuhan daerah dengan program yang dibiayai akibat adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah. Pasalnya pemerintah pusat memiliki program nasional yang terkadang program tersebut tidak sesuai dengan yang daerah butuhkan

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan, Bahwa, perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah dapat terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat mungkin memiliki kriteria tertentu untuk memberikan dana insentif daerah yang lebih bersifat umum dan terkait dengan program-program nasional, sedangkan pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda yang tidak selalu sesuai dengan program nasional.

Misalnya, pemerintah pusat mungkin memberikan dana insentif daerah untuk program kesehatan, sedangkan pemerintah daerah memiliki prioritas yang lebih besar untuk program infrastruktur. Perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana insentif daerah. Selain itu, perbedaan persepsi juga dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kriteria pemberian dana insentif daerah. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang prioritas dan kebutuhan daerah yang lebih spesifik. Dampak dari perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah adalah pengelolaan dana insentif daerah yang tidak efektif dan efisien, serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan konsultasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kriteria pemberian dana insentif daerah agar program pembangunan yang didanai oleh dana insentif daerah dapat lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Keterbatasan dalam sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam pengelolaan dana insentif daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BKAD Kota Madiun Ibu Sedy Alyandari Parila, S.Akun pada hari selasa 11 januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Dalam mengelola Dana Insentif Daerah memang kapasitas dan kemampuan administrasi BKAD Kota Madiun yang masih kurang memadai dapat menjadi hambatan dalam mengelola dana insentif daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang

memadai dalam mengelola dana insentif daerah, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas dan kemampuan administrasi pemerintah daerah dalam mengelola dana insentif daerah adalah sumber daya manusia yang kurang terlatih dan terampil. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam mengelola dana insentif daerah. Namun, terkadang pemerintah daerah kesulitan dalam merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih.

Keterbatasan dalam sumber daya manusia yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dana insentif daerah dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pengelolaan dana insentif daerah yang lebih baik.

Sumber daya manusia yang terbatas mencakup kurangnya jumlah pegawai yang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan dana insentif daerah. Keterbatasan ini dapat berdampak pada penundaan dalam pengajuan proposal penggunaan dana insentif daerah, penundaan dalam pelaksanaan proyek atau program yang telah disetujui, dan penurunan kualitas hasil kerja.

Solusi mengatasi hambatan ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang cukup dalam pengelolaan dana insentif daerah.

Dengan meningkatkan sumber daya manusia yang digunakan dalam pengelolaan dana insentif daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dana insentif daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih optimal.

Selain terdapat faktor hambatan seperti yang dijelaskan di atas tersebut, terdapat pula faktor pendukung dalam efektivitas Dana Insentif Daerah dalam meningkatkan belanja daerah di Kota Madiun, faktor pendukung tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan**

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana insentif daerah di Kota Madiun merujuk pada keterbukaan dan keteraturan dalam penggunaan dana tersebut. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Sudandi, S.Sos mengungkapkan bahwa:

Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dana Insentif Daerah Ada beberapa hal yang kami lakukan, di antaranya: Menerapkan sistem akuntansi yang baik: Kami menerapkan sistem akuntansi yang baik dan terintegrasi untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan keuangan. Dengan sistem ini, kami dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menjaga keterbukaan informasi: Kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan Dana Insentif Daerah. Kami menyediakan laporan keuangan secara teratur dan mudah diakses oleh masyarakat. Melakukan audit internal dan eksternal: Kami melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan efisien. Selain itu, kami juga melakukan audit

eksternal oleh pihak yang independen untuk memperkuat validitas hasil audit. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai: Kami terus meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Dengan demikian, kami yakin bahwa setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Transparansi ini berarti pemerintah Kota Madiun mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses tentang penggunaan dana insentif daerah kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan hasil yang dicapai.

Sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah daerah Kota Madiun dalam bertanggung jawab atas penggunaan dana insentif daerah dan menjelaskan hasil yang dicapai. Hal ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, pemantauan dan evaluasi yang berkala, serta penegakan hukum terhadap tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana insentif daerah.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah Kota Madiun dalam penggunaan dana insentif daerah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dan berkinerja lebih baik dalam menggunakan dana insentif daerah sehingga efektivitas penggunaan dana tersebut dapat tercapai.

2. Ketersediaan dan tercukupinya infrastruktur pendukung berupa teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan dana insentif daerah

Dalam pengelolaan dana insentif daerah, Teknologi Informasi juga merupakan faktor penting dalam mencapai efektivitas penggunaan dana tersebut. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Sudandi, S.Sos mengungkapkan bahwa:

Ada beberapa hal yang kami lakukan untuk memastikan ketersediaan dan tercukupinya infrastruktur TI dalam pengelolaan Dana Insentif Daerah, di antaranya menyediakan perangkat keras dan lunak yang memadai: Kami menyediakan perangkat keras dan lunak yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan Dana Insentif Daerah. Hal ini meliputi komputer, printer, software akuntansi, dan sistem keamanan data. meningkatkan jaringan internet: Kami terus meningkatkan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah kerja BKAD. Hal ini dilakukan agar proses pengelolaan dan pengawasan Dana Insentif Daerah dapat dilakukan secara online dan real-time. menggunakan sistem informasi manajemen keuangan: Kami menggunakan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dengan sistem ini, kami dapat memperoleh informasi yang akurat dan cepat mengenai penggunaan Dana Insentif Daerah. melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai: Kami terus melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai terkait dengan penggunaan TI dalam pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dengan demikian, kami yakin bahwa setiap pegawai dapat mengoperasikan perangkat dan sistem TI dengan baik

Teknologi Informasi dapat membantu memudahkan pengumpulan dan pengolahan data, pelacakan penggunaan dana, serta evaluasi kinerja. Beberapa Teknologi Informasi yang digunakan Kota Madiun dalam mengelola Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

- a. Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD): SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sistem informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi, yang mencakup pengelolaan anggaran, pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah. SIPD bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi ini dapat membantu mengelola dana insentif daerah dengan lebih efektif dan efisien. SIPD dapat memudahkan pengumpulan data keuangan dan pelaporan keuangan secara real-time. Dengan SIPD, pemerintah daerah dapat memantau penggunaan dana insentif daerah dengan lebih baik dan mencegah terjadinya kesalahan administratif.
- b. Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset (SIGMA): SIGMA merupakan aplikasi atau sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Madiun. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pendataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Sistem informasi ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan daerah-daerah yang membutuhkan dana insentif daerah. SIG juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek yang didanai oleh dana insentif daerah.

Dengan ketersediaan dan tercukupinya infrastruktur pendukung berupa Teknologi Informasi, pengelolaan dana insentif daerah dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi Informasi dapat memudahkan pengumpulan dan pengolahan data, pelacakan penggunaan dana, serta evaluasi kinerja. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memantau dan menilai efektivitas penggunaan dana insentif daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan ke depannya.

Upaya Pemerintah Kota Madiun dalam Menangani Hambatan Efektivitas Dana Insentif

Daerah

Upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada pengelolaan Dana Insentif Daerah Kota Madiun, Pemerintah Daerah Kota Madiun memiliki beberapa upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan di atas, berikut ini upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang baik
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Madiun Bapak Fajar Wahyu Margono, ST pada hari Selasa 12 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:
Seharusnya pemerintah daerah dilibatkan dalam menentukan prioritas penyaluran Dana Insentif Daerah, pasalnya hal itu berdampak pada efisiensi penyaluran Dana tersebut, misalnya saja penggunaan dana insentif daerah berdasarkan kebijakan dan program nasional yang sedang dijalankan, seperti program peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan. Namun, ternyata yang daerah butuhkan justru pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu Koordinasi dan konsultasi yang baik dalam menentukan kriteria pemberian dana insentif daerah dapat memastikan bahwa prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan program yang dibiayai. Hal ini juga dapat

meminimalkan ketidaksesuaian antara prioritas dan kebutuhan daerah dengan program yang dibiayai. Solusi dalam menghadapi hambatan menurut Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Madiun Bapak Fajar Wahyu Margono, ST bahwa:

Kami di BKAD berusaha untuk menjembatani perbedaan persepsi tersebut dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian mengedukasi tentang pentingnya penggunaan dana insentif daerah sesuai dengan prioritas nasional, namun juga memberikan ruang fleksibilitas dalam penggunaannya. Sementara itu, kami juga menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang kondisi nyata di daerah dan mengusulkan penyesuaian kriteria pemberian dana insentif daerah yang lebih sesuai dengan kondisi di daerah.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BKAD berupaya untuk mengatasi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah dengan melakukan beberapa tindakan seperti:

1. Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjembatani perbedaan persepsi.
2. Mengedukasi pemerintah daerah tentang pentingnya penggunaan dana insentif daerah sesuai dengan prioritas nasional, namun juga memberikan ruang fleksibilitas dalam penggunaannya.
3. Menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang kondisi nyata di daerah dan mengusulkan penyesuaian kriteria pemberian dana insentif daerah yang lebih sesuai dengan kondisi di daerah.

Melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah dapat diatasi sehingga dana insentif daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Staf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BKAD Kota Madiun Ibu Sedy Alyandari Parila, S.Akun yang menyatakan bahwa:

Kita berupaya untuk dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan Dana Insentif Daerah, Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis yang diperlukan agar mereka ini dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif. Pelatihan dan pendidikan dapat berupa pembekalan terkait pengelolaan anggaran, pelatihan penggunaan teknologi informasi, manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, dukungan teknis dapat diberikan untuk memperkuat sistem informasi dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan dana insentif daerah, seperti pengembangan aplikasi dan sistem informasi keuangan yang dapat membantu memudahkan proses pengumpulan data dan pelaporan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh BKAD merupakan sesuatu yang harus dilakukan mengingat peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana insentif daerah

sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana tersebut. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis yang diperlukan agar para pegawai terkait dapat memahami dan menguasai proses pengelolaan dana insentif daerah dengan baik.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana insentif daerah, diharapkan bahwa para pegawai pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan efisien, sehingga penggunaan dana insentif daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Terkait penyaluran Dana Insentif Daerah Kota Madiun diharapkan membuat peraturan khusus terkait pengelolaan Dana Insentif Daerah agar kedepannya dalam pengelolaan Dana Insentif Daerah di Kota Madiun sudah ada peraturan khusus atau peraturan wali kota. Terhadap perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memang seharusnya pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan peraturan terkait prioritas penyaluran Dana Insentif Daerah agar penyaluran Dana Insentif Daerah dapat efektif dan efisien. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia pemerintah daerah seharusnya memberikan diklat kepada pegawai agar dapat menunjang kualitas pegawai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilaksanakan di BKAD Kota Madiun penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut: BKAD Kota Madiun dalam pelaksanaan Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Meningkatkan Belanja Daerah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian tercapainya sasaran penyaluran Dana Insentif Daerah di Kota Madiun dengan Efektif, dapat dibuktikan dengan alokasi Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada Kota Madiun sebesar 53.024.863.000 mampu diserap sebesar 97.71%. Kendala yang sedang dihadapi oleh Bidang Anggaran dalam pelaksanaan penyaluran Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut: a. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria pemberian dana insentif daerah. b. Kapasitas dan kemampuan administrasi pemerintah daerah yang kurang memadai untuk mengelola dana insentif daerah secara efektif dan efisien. c. Keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dana insentif daerah. Kemudian Upaya yang dilakukan oleh BKAD dalam mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penyaluran Dana Insentif Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

B. Jurnal

Synta, & Nurhazana. (2021). *Efektivitas Dana Insentif Daerah dalam Mendukung Pencapaian*. *Jurnal IAKP*.

Wahid, M. H. (2015). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Takalar*.

Jannah, R. (2017). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen*.

